

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-135.11.2.693095/2025

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga

: (135)

KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi

: (11)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi

: (05)

JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker

: (693095)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
- Sebesar

:Rp.

7.305.054.000,00

(Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

TERLAMPIR

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni	Rp.	7.305.054.000,00	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0,00
PNBP TA Berjalan	Rp.	0,00	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00
			5. Hibah Langsung	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0,00
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0,00	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0,00
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00	6. SBSN PBS	Rp.	0,00

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Surabaya II

(135)

Rp.

7.305.054.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-135.11.2.693095/2025

Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	146.941.000,00
BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	146.941.000,00
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	7.158.113.000,00
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	7.158.113.000,00

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Jakarta, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga: (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	7.305.054.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	7.305.054.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	-	7.305.054,00	-	-	-	7.305.054,00	05.51	RM	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	146.941,00	-	-	-	146.941,00			
7133	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	146.941,00	-	-	-	146.941,00			
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	63.000,00	-	-	-	63.000,00			
01	RM	-	63.000,00	-	-	-	63.000,00	135@		RM
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	83.941,00	-	-	-	83.941,00	05.51		
01	RM	-	83.941,00	-	-	-	83.941,00	135@		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	7.158.113,00	-	-	-	7.158.113,00	05.51		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	7.158.113,00	-	-	-	7.158.113,00			
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00			135@
01	RM	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00			
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	239.093,00	-	-	-	239.093,00	05.51		
01	RM	-	239.093,00	-	-	-	239.093,00	135@		
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	37.000,00	-	-	-	37.000,00	05.51	RM	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
 II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode / Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
 Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	RM	-	37.000,00	-	-	-	37.000,00	135@	RM
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	102.000,00	-	-	-	102.000,00	05.51	
01	RM	-	102.000,00	-	-	-	102.000,00	135@	RM
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00	05.51	
01	RM	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00	135@	RM
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00	05.51	
01	RM	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00	135@	RM
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	5.544.000,00	-	-	-	5.544.000,00	05.51	
01	RM	-	5.544.000,00	-	-	-	5.544.000,00	135	RM
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.131.020,00	-	-	-	1.131.020,00	05.51	
01	RM	-	1.131.020,00	-	-	-	1.131.020,00	135	RM
	JUMLAH	-	7.305.054,00	-	-	-	7.305.054,00		

Jakarta, 2 Desember 2024
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

MIN USIHEN
 NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.000	580.734	659.284	686.202	653.395	694.986	768.722	740.934	737.944	693.889	731.039	355.925	7.305.054
		52 BELANJA BARANG DAN	2.000	580.734	659.284	686.202	653.395	694.986	768.722	740.934	737.944	693.889	731.039	355.925	7.305.054
		135.11.BB.7133 Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	1.000	3.000	15.000	15.932	35.000	38.688	25.000	8.671	4.650	0	0	146.941
		52 BELANJA BARANG DAN	0	1.000	3.000	15.000	15.932	35.000	38.688	25.000	8.671	4.650	0	0	146.941
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	2.000	579.734	656.284	671.202	637.463	659.986	730.034	715.934	729.273	689.239	731.039	355.925	7.158.113
		52 BELANJA BARANG DAN	2.000	579.734	656.284	671.202	637.463	659.986	730.034	715.934	729.273	689.239	731.039	355.925	7.158.113

Jakarta, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [693095] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR		Catatan
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 216.547,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 100,00
	52 BELANJA BARANG DAN Rp. 216.547,00		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7133	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM) 27.642,00
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Catatan
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 26.428,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 13.821,00
	Catatan		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak dapat dicairkan Rp. 13.214,00	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 132.465,00
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Tidak dapat dicairkan Rp. 66.233,00
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 72.501,00		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Catatan		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak dapat dicairkan Rp. 36.251,00		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 4.000,00
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Catatan
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak dapat dicairkan Rp. 2.000,00
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 37.826,00		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 30.940,00
	Catatan		Catatan
	Tidak dapat dicairkan Rp. 18.913,00		Tidak dapat dicairkan Rp. 15.470,00
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 200,00		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [693095] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 3.660,00
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 72.910,00		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	Catatan		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 36.455,00		
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 600,00		
	Catatan		
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 300,00		
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		
7136.BMA	Data dan Informasi Publik		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 9.580,00		
	Catatan		
	<i>Tidak dapat dicairkan</i> Rp. 4.790,00		
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 7.320,00		
	Catatan		

Jakarta, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.11.2.693095/2025
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [693095] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 2 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001